

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI MALUKU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA TAHUN 2018

TEHUBIJULUW ZACHARIAS

Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon

tehubijuluwzacharias@yahoo.com

This study aims to determine and understand the communication strategy of the Maluku Provincial KPU in increasing community participation in the 2018 elections. The research approach uses descriptive qualitative. Data was collected through interviews using interview guidance instruments. The results showed that the Maluku Provincial KPU communication strategy in increasing public participation in the 2018 elections included communication planning, mapping of voter segmentation according to typology and voter characteristics, audience analysis and segmentation, media selection and program evaluation

Keywords: community participation, communication strategy

PENDAHULUAN

Peningkatan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, partisipasi keterlibatan pemilih pada periode sebelum pemilihan. Namun pada tahun ini, dengan perkembangan media sosial, KPU Provinsi Maluku mampu membuka ruang diskusi publik dalam media sosial, seperti facebook, twitter, whatshap, instragram, dan media sosial yang lainnya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi Maluku melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat untuk menyadarkan bahwa berpartisipasi dalam Pilkada sangat dibutuhkan untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik. Artinya, sosialisasi yang sering dilakukan pihak KPU Provinsi Maluku adalah demi kesejahteraan bersama. Namun, banyak masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam pemilihan. Oleh karena itu, dalam sosialisasi butuh komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dimana dari komunikasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi itu sendiri menurut Raymond Ross “Komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator”. Tidak hanya cukup memahami apa itu komunikasi, namun KPU Provinsi Maluku juga

membutuhkan sebuah strategi komunikasi untuk dapat mengambil perhatian masyarakat supaya partisipasi masyarakat meningkat.

Rogers (1982) memberi batasan pengertian komunikasi sebagai sesuatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Pemilihan strategi menjadi komponen paling penting dalam mencapai tujuan akhir dari komunikasi, pemilihan strategi merupakan langkah krusial memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi. Sebab, jika salah atau keliru dalam menentukan strategi maka hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, tenaga materi dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para perencana.

Strategi adalah dibuat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena dalam tindakan mencapai tujuan, kekuatan dan kelemahan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berguna. Karena dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki akan lebih mudah untuk mengoptimalkannya. Sebaliknya, jika kita mengenal kelemahan, kita akan bisa menghindari atau bahkan berusaha menciptakan kekuatan dari kelemahan tersebut.

Tidak dapat ditolak bahwa strategi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seorang ahli strategi tidak bisa membuat strategi dengan sembarangan. Untuk hal itu, pengetahuan tentang pengertian strategi sangatlah penting. Jika pembuat strategi faham apa itu strategi, besar kemungkinan akan bisa menciptakan strategi yang lebih baik.

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan kepada beberapa persoalan terutama dalam penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku seseorang dalam skala besar melalui ide-ide baru. Dalam artian khususnya, strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal, sebab pemilihan strategi komunikasi menjadi hal yang paling krusial dan memerlukan ketelitian dalam proses perencanaan strategi komunikasi.

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication palnning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.

Subyek, Obyek, dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, singkatnya subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Subjek dalam penelitian ini adalah KPU Provinsi Maluku, Divisi SDM dan partisipasi masyarakat.

Obyek penelitian ini adalah ilmu administrasi publik khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan mengenai strategi komunikasi KPU. Jadi, dengan obyek penelitian tersebut dapat digunakan penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian menjadi sebuah data nyata dan dapat mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada.

Jenis dan Sumber Data

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan mengenai kategori data apa saja yang akan peneliti dapatkan serta dari mana saja asal dari data tersebut.

1) Data Primer

Data primer adalah data tangan pertama. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran. Atau sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari data primer ini peneliti mampu mendapatkan data valid yang sesuai dengan tema dan rumusan masalah yang ada. Sumber data primer ini yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah strategi komunikasi ketua KPU Provinsi Maluku, divisi SDM dan partisipasi masyarakat, dan masyarakat Provinsi Maluku.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan strategi komunikasi dan buku-buku sejenis yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder juga didapat dari buku *online*, jurnal dan artikel.

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Beberapa teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlu adanya identifikasi satuan (unit), pada mulanya perlu diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh informan yakni dari strategi komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak akan dirangkum dan dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses analisis data.

b. Display Data

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data selanjutnya memverifikasikan data sehingga menjadi kebermanaknaan data.

Dalam penelitian ini display data peneliti mendeskripsikan data yang didapat dari wawancara dengan informan tentang bagaimana strategi komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 dan dideskripsikan secara naratif.

c. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Selanjutnya apabila penarikan kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu adanya verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan evaluasi dan penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan sebagai penarikan makna yang telah disajikan. Untuk pemberian makna tentu saja sesuai dengan pemahaman peneliti. Dalam penelitian ini yang dimaksud verifikasi data dan penegasan kesimpulan yaitu setelah data mengenai perilaku komunikasi konsumen dideskripsikan kemudian ditarik kesimpulan bagaimana proses strategi komunikasi KPU pada pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018. Apabila dirasa kurang kuat kesimpulannya barulah diinterpretasikan tentang data wawancara maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan merujuk pada panduan pernyataan di atas, maka dilakukan pengumpulan data penelitian. Penelitian awalnya menggali data awal tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Provinsi Maluku. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Data seperti ini akan digunakan peneliti untuk melengkapi informasi yang hendak dijadikan detail informasi agar terdeskripsikan material maupun lainnya. Selain pihak KPU Provinsi Maluku, peneliti juga mewawancarai beberapa informan dari kalangan masyarakat seperti tokoh masyarakat dan yang lain. Strategi Komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan melalui beberapa cara yakni :

1. Pemilahan sasaran pemilih berdasarkan tipologi khalayak

Untuk mencapai tingkat partisipasi pemilih di atas lima puluh persen, KPU Provinsi Maluku memetakan tipologi pemilih, sehingga dengan pemetaan tersebut KPU dapat mengambil langkah dan strategi khusus kepada masing-masing tipe pemilih.

Mengenali sasaran komunikasi dalam hal ini pemilih adalah tergantung pada tujuan komunikasi tersebut, apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui saja (metode informatif) atau agar komunikasi melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruktif). Maka dari itu mengenali karakter komunikasi dalam hal ini pemilih menjadi hal yang sangat penting.

Berbagai cara pun akhirnya dipilih sebagai pendekatan terhadap pemilih yang sudah dikategorikan, dalam arti mendekati pemilih dengan kecenderungan pemilih sendiri. Seperti halnya mendekati para pemilih pemula atau yang lebih dikenal sebagai generasi milenial.

Melihat kondisi sosial budaya yang ada di Provinsi Maluku, maka KPU Provinsi Maluku melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (pemilih) Pemilu 2018 di Provinsi Maluku merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2018 bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan proses demokrasi yang dilaksanakan di daerah oleh KPU. Bahan evaluasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi ke depan KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat/pemilih. Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah; Pertama, faktor-faktor penyebab menurunnya tingkat partisipasi masyarakat/pemilih dalam pemilu maupun pilukada di Provinsi Maluku karena faktor sosialisasi yang dilakukan oleh KPU yang kurang efektif dan komunikatif, selain itu belum dilakukan secara menyeluruh. Sosialisasi yang baik akan menggugah kesadaran calon pemilih untuk menggunakan haknya dalam Pemilu. Kedua, faktor kandidat atau figur. Khususnya Pemilu untuk DPR dan DPRD kandidatnya lebih banyak dan lebih dekat dengan calon pemilih dibandingkan dengan kandidat dalam Pemilu Presiden. Sementara Pemilu Presiden hanya digerakkan tim suksesnya saja. Ketiga, pemilih sudah semakin cerdas dalam menentukan siapa calon pemimpinnya, sehingga ketika terdapat calon yang kurang bisa diterima oleh masyarakat maka akan mempengaruhi antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu/pilukada. Faktor-faktor penyebab golput selalu hadir dalam setiap Pemilu dan Pilukada adalah: Pertama, problem struktural, seperti adanya DPT ganda, adanya orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam DPT. Kedua, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena terbentur dengan jam kerja. Ketiga, pilihan rasional, dimana para pemimpin dianggap tidak ada yang sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, faktor pendidikan politik pemilih, bahwa semakin tinggi pemahaman pendidikan politik warga negara, biasanya angka golputnya semakin naik.

2. Pemilihan Media Penggunaan Teknologi Informasi

Hampir tidak ada masyarakat yang tidak bersentuhan sama sekali dengan teknologi informasi. Pada saat bersamaan, teknologi informasi juga berkembang dengan cepat. Situasi tersebut perlu direspon dengan baik untuk pendidikan pemilih. Teknologi informasi memiliki daya jangkauan yang sangat luas dan akses real time. Internet, gadget, sistem aplikasi, teknologi visual, audio-visual dan sebagainya saat ini begitu dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Melalui itu berbagi informasi berupa data, suara, gambar dan video dapat diperoleh dengan cepat, mudah dan murah. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh kehadiran teknologi informasi.

Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi kontemporer akan mendorong partisipasi. Pemilih akan terdorong berkontribusi dan memberikan umpan balik atas topik atau masalah yang sedang menjadi pembahasan bersama, atas kesadaran sendiri. Pendidikan pemilih juga menjadi lebih transparan dan dapat dijangkau oleh semua pihak dan sepanjang waktu. Konektivitas dan jejaring antar sesama pengguna yang terlibat dalam pendidikan pemilih juga dapat tercipta dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi informasi kontemporer untuk pendidikan pemilih dapat mendorong suatu advokasi publik atas suatu persoalan. Setiap orang bebas menyuarakan ide atau kepentingannya sekaligus meminta dukungan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tak selamanya dapat dirasakan jika khalyak belum bisa menerima kecanggihan teknologi secara utuh, di Provinsi Maluku misalnya, setiap pesan lebih bermakna dan efektif tersampaikan jika melalui tatap muka. Hal itu lebih cenderung berhasil mengingat budaya dan adat masyarakat yang masih terbilang baru berkembang ke arah modern.

3. Menanamkan pentingnya kesadaran berdemokrasi kepada khalayak

Kesadaran akan pentingnya demokrasi di Provinsi Maluku memang terbilang masih minim, hal itu ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih dari tahun 2012 dan tahun 2018 yang hanya berkisar di angka 64 dan 65 persen. Artinya angka golput atau tidak memilih masih relatif cukup tinggi di Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, KPU Provinsi Maluku terus berupaya melakukan penyadaran akan penting berdemokrasi di Provinsi Maluku dengan berbagai cara seperti lebih mengutamakan sosialisasi secara berkala dan persuasif.

Seperti paparan di sub bab sebelumnya, masyarakat khususnya Provinsi Maluku masih memegang nilai dan ajaran para sesepuh tentang sikap takdim kepada orangtua dan guru. Keberadaan pemerintah dalam hal ini kepada daerah berada di posisi ketiga dalam strata

sosial. Atas dasar itu langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku yang menjadi titik point paling penting ialah meningkatkan kualitas pendidikan pemilih.

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu keada satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan.

Indonesia sela ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta warga negara Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Warga negara yang dalam rentang waktu lima tahun kemudian menjadi pemilih disebut sebagai pra-pemilih. Pendidikan Pemilih, dengan demikian, adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Pendidikan memilih penting karena beberapa alasan:

- a. Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak.
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.
- c. Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan memilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
- d. Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan memilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggungjawab pemilih dalam sistem

demokrasi. Ini akan memperkokoh advokasi warga negara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

Dewasa ini, banyak *stigma negative* yang berkembang terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Politik dimaknai secara delusional oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dikarenakan elit politik itu sendiri. Sesungguhnya dalam sebuah politik, terdapat kajian-kajian penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Mengutip dari Aristoteles, *politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama*. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Seyogyanya, ini merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah, elite parpol dari partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah.

Partai politik di Provinsi Maluku yang seharusnya memiliki andil besar dalam pendidikan politik harus mengambil langkah agar dapat mengubah *image* miring yang ada di Provinsi Maluku tersebut. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara di bumi tercinta Indonesia ini. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan generasi muda supaya memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kesadaran berdemokrasi di kota salak.

Pada akhirnya, semua pihak harus turut serta di dalam pendidikan politik agar masyarakat mau dan peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Apabila tidak dimulai dari sekarang, hal ini dapat menyebabkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kaum muda sebagai generasi penerus harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang.

4. Mengutamakan kelompok perempuan dalam sosialisasi

Pemilih perempuan adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender. Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih laki-laki namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pemilu maupun di luar pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih

perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.

Di lain sisi, pemilih perempuan adalah corong yang terbilang cukup efektif sebagai media sosialisasi, sebab ibu-ibu ini cara beradaptasi dengan lingkungan lebih sering. Organisasi perempuan juga penting diberi pemahaman. Karena menurutnya perempuan bisa menyampaikan informasi dari mulut ke mulut di lingkungan sekitarnya terutama yang terorganisir dengan lebih cepat.

5. Memastikan Netralitas KPU Provinsi Maluku

Penyelenggara pemilu, termasuk pemilihan umum kepala daerah, harus orang yang netral, bukan anggota partai politik atau mantan anggota parpol. Persyaratan itu penting untuk menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan KPU Daerah.

Jika merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, netralitas merupakan hal penting yang harus dimiliki penyelenggara pilkada. Netral berarti tidak memihak kepada salah satu kontestan. Di sejumlah agenda - misalnya pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah PPK atau pun PPS-, ketua KPU Kabupaten/Kota menginstruksikan agar penyelenggara benar-benar memegang teguh prinsip netralitas. Mencoreng lembaga penyelenggara.

Bagi penyelenggara pilkada, setidaknya ada dua hal yang termasuk pelanggaran berat, yakni: a) menghilangkan hak pilih warga; b) mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Kedua hal tersebut diusahakan untuk dihindari seorang penyelenggara pilkada atau pemilu. Jika pelanggaran di atas dilakukan, karier penyelenggara tersebut akan “tamat”. Namanya akan masuk “daftar hitam” di lembaga penyelenggara kepegawaian. Ia tidak akan diterima jika suatu hari kemudian ia ikut mendaftar sebagai penyelenggara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori diantaranya teori perencanaan strategi model John Middleton untuk menganalisis hasil temuan penelitian melalui teori diatas. Hasil dari temuan peneliti yang sudah ditetapkan sebelumnya dicari relevansinya dengan teori-teori yang ada, sehingga ditemukan sebuah jawaban yang relevan dengan teori. Berdasarkan teori tersebut, strategi komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi pemilih ada beberapa langkah yakni :

1. Perencanaan komunikasi yang dimaksud adalah untuk memperhatikan dan menentukan komponen-komponen komunikasi serta meminimalisir faktor-faktor penghambat pada setiap komponen tersebut dalam hal untuk mewujudkan tujuan dari

sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih . Selain dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks sosialisasi pemilihan kepala daerah lebih jauh lagi sosialisasi dan persuasive ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik.

2. Setelah menetapkan database atau DPT. KPUD kemudian mulai memetakan segmentasi pemilih menurut pada tipologi dan karakteristik pemilih, dengan begitu KPU Provinsi Maluku dapat menentukan cara yang akan dipilih dalam menentukan model pendekatan kepada pemilih. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, secara operasional dapat ditelusuri dari beberapa kondisi di sekitar “golput” dan memadukannya untuk mencari titik temu secara operasional.
3. Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah, seperti memetakan tipologi pemilih melalui kecenderungan khalayak.
4. Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap berikut ini. Pertama mendaftar media yang sudah ada. Semua media yang mungkin mendukung program komunikasi di data dan bila perlu dikelompokkan menurut keperluan program. Setelah pendataan dilakukan evaluasi, media mana saja yang sesuai dari segi waktu, jangkauan segment, biaya, dan efektifitas.
5. Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik. Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi ongoing dan end review. Evaluasi ongoing dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga fleksibilitas sebuah program. Sedangkan end review mencakup semua evaluasi dari awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi ongoing dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Strategi komunikasi KPU Provinsi Maluku dalam meningkatkan partisipasi pemilih ada beberapa langkah yakni :

1. Perencanaan komunikasi yang dimaksud adalah untuk memperhatikan dan menentukan komponen-komponen komunikasi serta meminimalisir faktor-faktor penghambat pada setiap komponen tersebut dalam hal untuk mewujudkan tujuan dari sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih . Selain dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam konteks sosialisasi pemilihan kepala daerah lebih jauh lagi sosialisasi dan persuasive ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran politik.
2. Pemetaan segmentasi pemilih menurut pada tipologi dan karakteristik pemilih, dengan begitu KPU Provinsi Maluku dapat menentukan cara yang akan dipilih dalam menentukan model pendekatan kepada pemilih.
3. Analisis dan segmentasi khalayak juga harus dilaksanakan dengan menentukan siapa target sasaran program yang sedang dijalankan. Analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada tipe publik yang dihadapi. Pemrogram komunikasi setidaknya harus memilah publik menjadi tiga kelompok. Pertama, Latent Public yaitu kelompok yang menghadapi masalah dan tetapi tidak mempunyai perhatian lebih. Kedua, adalah aware public, yaitu kelompok yang bertanggung jawab terhadap masalah. Sedangkan yang terakhir adalah active public yaitu kelompok yang melakukan tindakan terhadap masalah, seperti memetakan tipologi pemilih melalui kecenderungan khalayak.
4. Pemilihan media sangat penting dilakukan dengan memperhatikan tiap tahap berikut ini. Pertama mendaftar media yang sudah ada. Semua media yang mungkin mendukung program komunikasi di data dan bila perlu dikelompokkan menurut keperluan program. Setelah pendataan dilakukan evaluasi, media mana saja yang sesuai dari segi waktu, jangkauan segment, biaya, dan efektifitas.
5. Evaluasi Program dibutuhkan untuk melihat apa saja tindakan dalam program yang tepat dan mana yang tidak sehingga ke depannya bisa dilakukan program yang lebih baik. Evaluasi bisa dibagi menjadi dua yaitu evaluasi ongoing dan end review. Evaluasi ongoing dilaksanakan selama proses berlangsung dan akan menjaga fleksibilitas sebuah program. Sedangkan end review mencakup semua evaluasi dari

awal sampai akhir yang akan merangkum semua evaluasi ongoing dan perbaikannya sehingga bisa dijadikan pijakan untuk pelaksanaan program berikutnya.

Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka disarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas dan wewenang serta dapat mensukseskan pemilihan umum secara maksimal, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain yang terkait. Adapun saran lain,yaitu:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalisasikan peran dan fungsinya dalam mendorong KPU untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih.
2. KPU Provinsi Maluku diharapkan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkat partisipasi pemilih tidak monoton dan jangkaun dan kuantititasnya diperbanyak lagi.
3. Untuk seluruh masyarakat terutama pemilih pemula atau pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.
4. Pelaksanaan Pemilu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara (KPU), pemerintah, partai Politik dan masyarakat, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rozaki, *Menabur Karisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta. (Pustaka Marwa, 2004)
- Alih Saukah, *pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: IKIP Malang, 2000)
- Anton Bakker, Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Bryan S, Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*, Terj. GA Ticolu (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Grafindo Persada, 2001)
- George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (Boston: Allyn and)
- John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Siderajat (Yogyakarta: Tititan Ilahi Press, 1994)

S. Takdir Alisyahbana, *Values as Integrating forces in Personality, Society and Culture* (Kuala Lumpur: Universitas of Malay Press, 1997)

Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500 -1900, dari Emperium sampai Imperium*, jilid 1, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989)

Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994)

Sumber Undang-undang

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

UU RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak.

UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tetang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sumber Internet

Imma Indra Dewi W. 2014 “Hak Politik Penyandang Disabilitas”. (Sumber: <http://fisip.uajy.ac.id/2014/02/13/hak-politik-penyandang-disabilitas/> Akses 27 Oktober 2015).

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilu (KPU) dengan Pusat Pemilu Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP PPUA PENCA/III/2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia. (Sumber: [www.kpu.go.id/dmdocuments/\(11.3.2013\)%20MoU%20PENCA-A.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/(11.3.2013)%20MoU%20PENCA-A.pdf). Akses 18 November 2015).

Sahid, Mungky. 2014. "Penyandang Disabilitas Tuntut KPU Sediakan Fasilitas Pemilu untuk Kaum Difabel". (Sumber: <http://www.gresnews.com/berita/politik/1110172-penyandang-disabilitas-tuntut-kpu-sediakan-fasilitas-Pemilu-untuk-kaum-difabel/>. Akses 10 November 2015).